

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan cerminan kemampuan suatu instansi pemerintah dalam mengelola dan menggunakan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks instansi pemerintah seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), kinerja keuangan berperan penting sebagai alat evaluasi dalam menilai apakah program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang ditetapkan. Menurut Fahmi (2014), kinerja keuangan dapat diartikan sebagai hasil dari proses keuangan yang menunjukkan sejauh mana suatu entitas mampu mengelola aset dan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam instansi pemerintah, hal ini berkaitan erat dengan pencapaian target pembangunan serta pemanfaatan anggaran secara ekonomis dan transparan.

Lebih lanjut, Harahap (2015) menjelaskan bahwa kinerja keuangan dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan, seperti rasio keuangan, analisis tren, hingga perbandingan dengan standar atau target kinerja. Beberapa indikator yang sering digunakan dalam mengukur kinerja keuangan instansi publik antara lain rasio efektivitas, efisiensi, dan ekonomis, yang dikenal dengan pendekatan value for money. Ketiga indikator tersebut membantu menilai seberapa optimal instansi pemerintah

dalam menggunakan sumber daya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, serta dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

2. Indikator Kinerja Keuangan

Menurut Mahmudi dalam (Dara Nadeya Dinanty et al., 2023), terdapat beberapa indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan, yaitu:

- a. Rasio Efisiensi-Menilai sejauh mana sumber daya keuangan yang digunakan menghasilkan output yang optimal
- b. Rasio Efektivitas-Mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan keuangan
- c. Rasio Likuiditas Menggambarkan kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
- d. Rasio Solvabilitas-Mengukur kemampuan suatu organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
- e. Rasio Kemandirian Keuangan-Menunjukkan seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran daerah tanpa bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor utama yang berperan dalam

menentukan kinerja keuangan menurut (Ginting, 2021) adalah:

- a. Kebijakan Anggaran-Keputusan yang diambil dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sangat berpengaruh terhadap realisasi keuangan.
- b. Sumber Daya Manusia-Kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola keuangan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran.
- c. Sistem Pengendalian Intern-Keberadaan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik dapat mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas-Tingkat keterbukaan dalam laporan keuangan serta pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana publik dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.
- e. Teknologi Informasi-Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kesalahan administrasi. Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah maupun organisasi dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka dengan strategi yang lebih terarah dan efektif.

4. Manfaat Kinerja Keuangan

Manfaat evaluasi kinerja keuangan dalam pemerintahan daerah meliputi:

- a. Menilai pencapaian yang telah diraih dalam suatu periode tertentu, yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.
- b. Menentukan sejauh mana suatu unit atau bagian berkontribusi terhadap

pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

- c. Menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan untuk periode mendatang.
- d. Memberikan panduan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan aktivitas operasional.

5. Tujuan Kinerja Keuangan

Menurut (Mahmudi, 2019), pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. Menilai Kemampuan Keuangan dalam Membiayai Kegiatan Operasional: Kinerja keuangan membantu menentukan apakah suatu organisasi memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menjalankan operasionalnya secara berkelanjutan.

- b. Mengukur Efektivitas Implementasi Anggaran:

Evaluasi kinerja keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah direncanakan dan diimplementasikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

- c. Menentukan Tingkat Kemandirian Keuangan:

Dalam sektor publik, analisis kinerja keuangan dapat menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai belanja daerahnya tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

- d. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan:

Pengelolaan keuangan yang baik memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan telah sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.

- e. Mengevaluasi Dampak Keuangan terhadap Pencapaian Tujuan Organisasi: Tujuan utama dari pengelolaan keuangan adalah memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai visi dan misi organisasi.

2.2 Value For Money

1. Pengertian Value For Money

Value for Money adalah konsep dalam pengelolaan organisasi sektor publik yang menekankan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam menilai sejauh mana suatu instansi publik mampu menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Konsep ini menjadi sangat penting dalam tata kelola keuangan pemerintah, karena berperan dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar memberikan manfaat yang sebanding, atau bahkan lebih besar, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Penerapan prinsip Value for Money bukan hanya tentang menghemat anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan dan program pemerintah memberikan dampak nyata serta berkualitas bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran publik.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam Dila Wandasari & Aqwa Naser Daulay (2023), VfM merupakan gagasan pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Elemen ekonomi menekankan pentingnya memperoleh input dengan biaya

yang paling rendah tanpa mengorbankan kualitas. Efisiensi mengacu pada kemampuan organisasi dalam memaksimalkan output dari sumber daya yang tersedia, sedangkan efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan dan hasil program berhasil dicapai. Dengan demikian, konsep Value for Money menjadi kerangka evaluasi yang penting dalam menilai kinerja keuangan instansi pemerintah, termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

2. Indikator *Value For Money*

Indikator utama dalam pengukuran *Value for Money* meliputi:

- a. Ekonomi: Menekankan pada pengadaan input dengan kualitas tertentu pada harga terendah.
- b. Efisiensi: Mengukur hubungan antara input dan output, yaitu sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan output tertentu.
- c. Efektivitas: Menilai sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Value For Money*

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan *Value for Money* dalam organisasi sektor *publik* antara lain:

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran: Perencanaan yang matang memastikan alokasi sumber daya yang tepat sasaran.
- b. Sistem Pengendalian Internal: Pengawasan yang efektif

mencegah inefisiensi dan penyimpangan.

- c. Kompetensi Sumber Daya Manusia: Tenaga kerja yang kompeten mampu mengelola sumber daya secara optimal.

4. Manfaat *Value For Money*

Penerapan *Value for Money* dalam organisasi sektor publik memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- a. Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik: Pelayanan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik: Kualitas layanan meningkat seiring dengan optimalisasi penggunaan sumber daya.
- c. Menurunkan Biaya Pelayanan Publik: Penghematan biaya melalui pengurangan inefisiensi dan pemborosan.

5. Tujuan *Value For Money*

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Sektor Publik: Memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang sebanding.
- b. Memperbaiki Kinerja Pemerintah: Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

2.3 Laporan *Realisasi Anggaran*

1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Merupakan laporan yang menyajikan data terkait penerimaan, pengeluaran, transfer dana, surplus atau defisit, serta pembiayaan dan selisih pembiayaan anggaran, yang

dibandingkan dengan alokasi anggaran dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur-unsur yang terdapat pada laporan realisasi anggaran terdiri dari:

- a. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

1) Belanja Langsung

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam pasal 50. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

2) Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja subsidi, hibah, bantuan sosial,

belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga

- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana penimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- e. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang diantara pendapatan dan belanja selama satu periode terdapat dalam pos surplus atau defisit.

1. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Athirah, 2017)

2. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Dalam laporan realisasi anggaran akan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan (LRA, belanja, transfer, surplus atau deficit LRA) dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggarannya. Melalui informasi yang dihasilkannya akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam menentukan proses pengambilan keputusan selanjutnya, serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi dan akuntabilitas public.(Athirah, 2017)

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sumber perbandingan dan acuan yang relevan. Dalam upaya menghindari kesan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini mencakup hasil-hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dara Nadeya Dinanty, Nur Ainiyah, Hartono, Nurdiana Fitri Isnaini (2023)	Analisis Realisasi Anggaran dalam mengukur kinerja keuangan dalam pendekatan <i>value for money</i> dan rasio keuangan di kecamatan gedeg periode 2017-2022	Deskriptif Kualitatif	Kesimpulannya dari penelitian sebelum pandemi Covid-19 Kinerja keuangan berdasarkan <i>Value For Money</i> tergolong cukup ekonomis, cukup efisien, dan sangat efektif (2017-2019). Pada tahun 2020, saat pandemi, kinerja tetap cukup ekonomis tetapi menjadi tidak efisien, meskipun masih sangat efektif. Dari sisi keuangan, desentralisasi fiskal sangat baik,

					ketergantungan keuangan daerah rendah, namun efektivitasnya kurang optimal. Pasca Pandemi (2021), belanja menjadi kurang ekonomis, cukup efisien, tetapi tetap sangat efektif, mencerminkan dampak kebijakan pemulihan ekonomi
2	Enre, Debby Tamara	Analisis <i>Value For Money</i> Anggaran Pendapatan pada Pemerintah Kota Medan	Deskriptif Kuantitatif		Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Medan masih belum mencapai tingkat optimal. Serta pengelolaan keuangan pada tingkat lokal pendapatan asli daerah (PAD) Belum efektif dan efisien. Tingkat kemandirian Keuangan daerah masih tergolong rendah.
3	Solong, Najmawati Petta Sultan, Amai Gobel, Yulia	Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan pendekatan <i>Value For Money</i> pada	Deskriptif Kuantitatif		Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2019-2021 telah

	Puspitasari Kurniawan, Arafah. (2022)	satuan kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo Periode Tahun 2019-2021.		mencapai nilai rasio yang maksimal dan disertai penghematan setiap tahunnya.
4	Anti, Churin Husnia, (2022)	Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah menggunakan pendekatan <i>Value For Money</i> (studi kasus pada kabupaten Nabire Tahun 2019-2021)	Deskriptif Kuantitatif	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan tahun 2019 serta tahun 2021 dikategorikan tidak ekonomis dan tidak efisien, karena realisasi anggaran mengalami defisit.
5	Athirah (2017)	Pemanfaatan informasi Laporan Realisasi Anggaran di Lingkungan Pemerintahan (Studi Kasus Dinas Perkebunan Prov. Sul-Sel)	Deskriptif Kuantitatif	Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Medan masih belum mencapai tingkat optimal. Serta pengelolaan keuangan pada tingkat lokal pendapatan asli daerah (PAD) Belum efektif dan efisien. Tingkat kemandirian Keuangan

daerah

masih

tergolong

rendah.

6	Mitha Nolasari, Maria, Nurhasanah (2023)	Realisasi Belanja dengan Pendekatan Value For Money pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Palembang	Deskriptif Kuantitatif	Kesimpulannya dari penelitian ini bertujuan menganalisis realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Palembang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 2018–2021. Hasilnya menunjukkan: rasio ekonomi meningkat pada 2018–2019 (sangat ekonomis) namun menurun pada 2020–2021 (tetap sangat ekonomis); rasio efisiensi menurun pada kedua periode namun tetap sangat efisien; rasio efektivitas menurun sebelum pandemi dan meningkat selama pandemi (keduanya tetap efektif). Secara keseluruhan, Dinas Sosial dinilai baik dalam pengelolaan anggaran, dengan belanja yang stabil meskipun terdapat penurunan drastis pada belanja modal di awal pandemi.
---	--	---	------------------------	--
